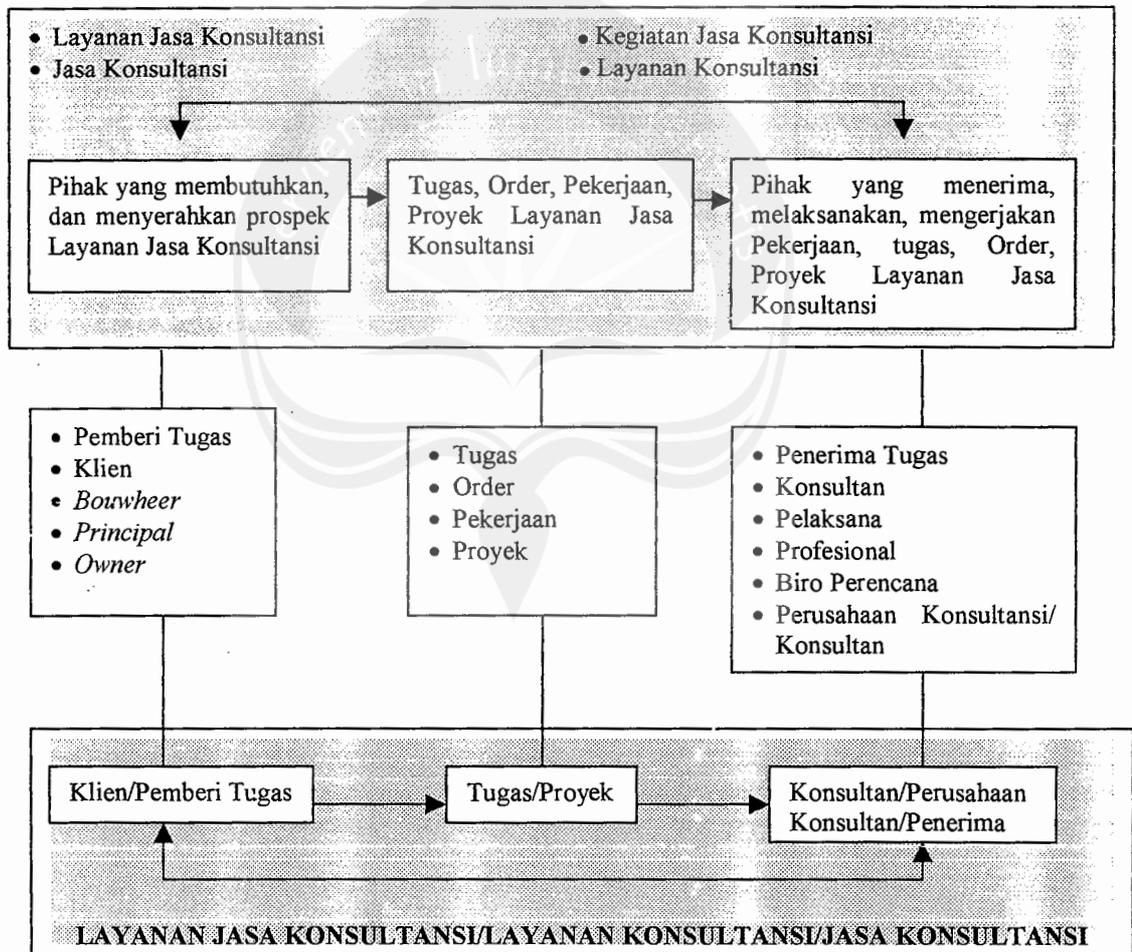


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anatomi Usaha Jasa Konsultansi Indonesia

Layanan Jasa Konsultansi dapat berlangsung jika terdapat pihak yang memerlukannya dan pihak yang karena keahliannya mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Diagram alir yang menggambarkan peristiwa tersebut menurut Rissard Pehiadang dkk (1997) adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1. Diagram Alir Klarifikasi Terminologi

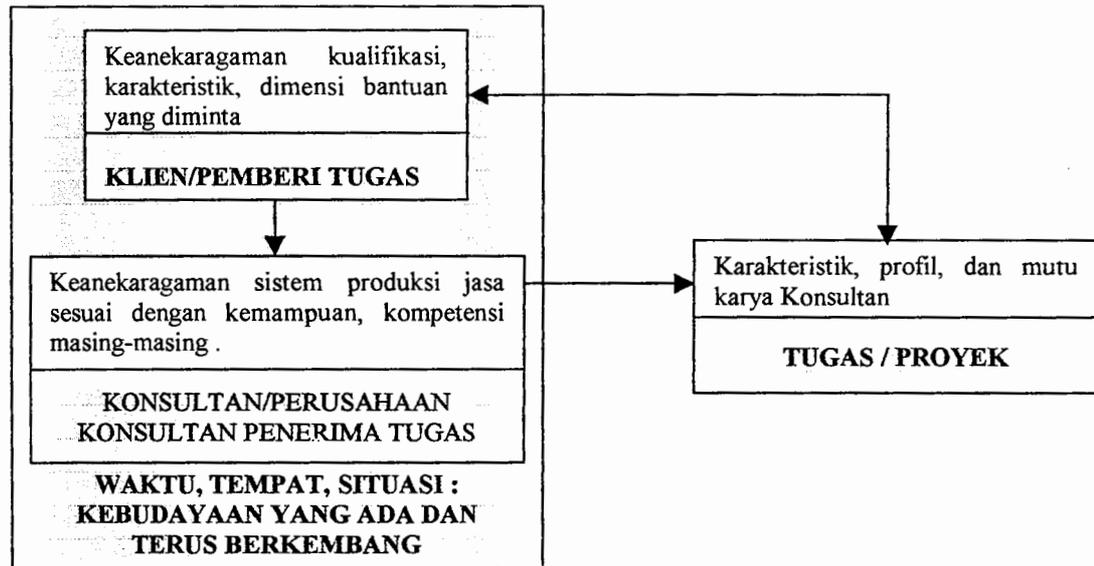
Sumber : Pehiadang dkk, 1997, Konsultan Indonesia dalam Perspektif, Gramedia, hal.3.

2.2 Lingkup Pengertian Klien

Klien dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok utama (Rissard Pehiadang dkk,1997), yakni :

- a. Pemerintah
- b. Swasta (nasional,asing)
- c. Perseorangan (nasional,asing)
- d. Lembaga-lembaga non Pemerintah (nasional, asing)

Waktu, tempat, situasi, dan perkembangan kebudayaan (di dalamnya tercakup berbagai karya manusia seperti sistem kemasyarakatan dan pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pendidikan, pergaulan internasional, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan lain-lain) yang berubah dengan cepat, akan sangat mempengaruhi sekaligus membentuk berbagai wujud kebutuhan Layanan Jasa Konsultansi yang dibutuhkan oleh Klien secara langsung maupun tidak langsung sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan, peningkatan, pengembangan, atau penyesuaian sistem produksi Jasa Konsultansi. Hal ini terlihat jelas pada karakteristik, profil, dan mutu Layanan Jasa Konsultansi yang dihasilkannya (Lihat Diagram Alir 2).



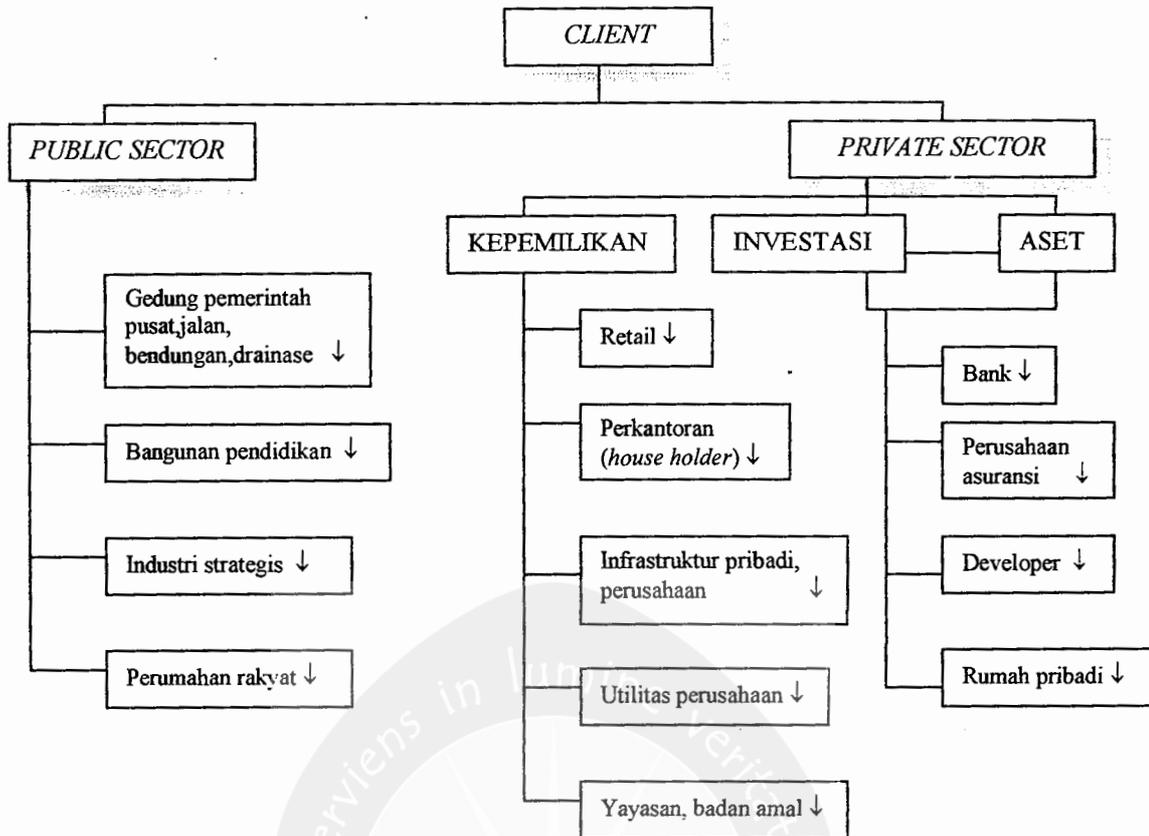
Gambar 2.2 Diagram Alir Kondisi – kondisi yang Saling Mempengaruhi Berlangsungnya Proses Layanan Jasa Konsultansi

Sumber : Pehiadang dkk, 1997, *Konsultan Indonesia dalam Perspektif*, Gramedia, hal.7.

Menurut Flanagan dan Norman (1993) klien industri konstruksi berdasarkan sumber pendanaan proyek dibagi dalam 2 kelompok yaitu *public sector* dan *private sector*.

Kebutuhan dan kepentingan klien dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu :

1. Memberikan pelayanan dan memproduksi barang, misalnya pabrik dan perkantoran.
2. Memperbaiki atau menambah infrastruktur ekonomi, misalnya PLTA dan pengolahan limbah.
3. Kepentingan sosial, misalnya Rumah Sakit dan Gereja.
4. Investasi yang dapat langsung digunakan, misalnya rumah tinggal.



Gambar 2.3. Klien Industri Konstruksi Berdasar pada Sumber Pendanaannya
 Sumber : Flanagan dan Norman (1993), *Risk Management and Construction*, Blackwell Science, hal.10.

Menurut Hinze (1993), sumber pendanaan pada *private project* adalah :

1. Pendanaan yang berasal dari modal (*capital*) sendiri.
2. Pinjaman langsung dari pihak kreditor
3. Penjualan aset-aset yang dimiliki
4. Penjualan saham
5. Jaminan perusahaan (*corporate bond*)
6. Donatur

Sedangkan pada *public project*, sumber pendanaan berasal dari :

1. Biaya operasional tahunan
2. Pajak

3. Jaminan yang dikeluarkan untuk tujuan tertentu
4. Donatur

2.3. Lingkup Pengertian Konsultan

Kata Konsultan berasal dari bahasa Inggris yaitu *consultant* (kata benda), yang dibentuk dari kata kerja *to consult*, yang artinya memberi nasehat. Kata “consultant” berarti orang yang memberikan nasehat. Urusan pemberian nasehat telah berkembang sedemikian pesatnya sehingga tidak seluruhnya dapat dilaksanakan oleh Konsultan Perseorangan, tetapi oleh Perusahaan Konsultan/Konsultansi.

Konsultan adalah perusahaan yang karena profesinya siap memenuhi kebutuhan dan berupaya mengerjakan prospek Layanan Jasa Konsultansi yang diterimanya dari pihak yang membutuhkan, berdasarkan lingkup tugas yang disepakati bersama (Rissard Pehiadang dkk,1997).

2.3.1. Lingkup Jasa Konsultan

Lingkup jasa konsultansi menurut buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (2000) meliputi : layanan survai, layanan studi makro, layanan studi rinci, layanan perancangan dan perencanaan, layanan pengawasan, layanan produksi dan industri, layanan konsultansi operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi, layanan jasa informasi, layanan jasa manajemen, penelitian dan pelatihan serta layanan jasa penasehatan.

Jasa atau layanan yang diberikan perusahaan jasa Konsultansi Bangunan terdiri atas :

- a. Pra Studi Kelayakan, baik untuk indikasi kelayakan investasinya, untuk kepentingan lembaga-lembaga pemberi pinjaman, keputusan prioritas proyek maupun informasi awal dalam kaitan permasalahan atau penawaran investasi kepada sektor swasta.

- b. Studi Kelayakan, sebagai informasi kepada sumber-sumber pembiayaan dan keputusan daripada investor.
- c. Apraisal : proses dari pelaksanaan studi kelayakan, ketersediaan pembiayaan perancangan/perencanaan dan pembangunannya melalui kesenjangan waktu apraisal, review studi – studi yang pernah dilaksanakan sesuai tahapannya.
- d. Studi Dampak Lingkungan, yang mampu mengatasi kurun waktu masing-masing persiapan, pelaksanaan konstruksi dengan pemanfaatan proyeknya.
- e. Perancangan dan perencanaan yang mampu memberikan hasil yang ekonomis dan efisien dengan memperhatikan perkembangan - perkembangan teknologi dan biaya pemeliharaan dan pengoperasian.
- f. Manajemen pembangunan yang meliputi manajemen konstruksi, manajemen proyek, dan manajemen pembangunan.
- g. Pengelolaan manajemen, pemeliharaan, pengoperasian.

Jelas bahwa dengan uraian di atas diketahui bahwa peran Konsultan dalam proses pembangunan sangat strategis.

Wilayah operasi Rekanan pada pelelangan dan pemilihan langsung untuk pekerjaan jasa konsultansi diatur sebagai berikut menurut buku Daftar Rekanan Mampu Pekerjaan Jasa Konsultansi (2000) :

1. Pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - a. Rekanan C dari Dati II yang bersangkutan.
 - b. Apabila tidak cukup, dapat diundang Rekanan B Dati II yang bersangkutan.
 - c. Apabila tidak cukup, dapat diundang Rekanan C dari Dati II yang terdekat (wilayah yang berdekatan/perbatasan langsung).
 - d. Apabila tidak cukup, dapat diundang Rekanan B dari Dati II yang terdekat (wilayah yang berdekatan/perbatasan langsung) .

- e. Apabila tidak cukup, dapat diundang Rekanan C dari Dati II lain dalam satu Propinsi .
 - f. Apabila tidak cukup, dapat diundang Rekanan B dari Dati II lain dalam satu Propinsi .
2. Pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- a. Rekanan B Propinsi yang bersangkutan.
 - b. Apabila tidak cukup, dapat diundang Rekanan A dari Propinsi yang bersangkutan.
 - c. Apabila tidak cukup, dapat diundang Rekanan B dari Propinsi yang terdekat (wilayah yang berdekatan/perbatasan langsung) .
 - d. Apabila tidak cukup, dapat diundang Rekanan A dari Propinsi yang terdekat (wilayah yang berdekatan/perbatasan langsung) .
 - e. Apabila tidak cukup, dapat diundang Rekanan B dari Propinsi lainnya.
 - f. Apabila tidak cukup, dapat diundang Rekanan A dari Propinsi lainnya .
3. Pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- a. Rekanan A (tanpa mempertimbangkan domisilinya)
 - b. Apabila masih mencukupi diprioritaskan Rekanan kualifikasi A dari Propinsi yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan kesempatan berusaha di Daerah dengan tetap memperhatikan adanya persaingan yang sehat.

2.3.2. Penyedia Jasa Konsultansi

Dalam buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (2000), penyedia jasa konsultansi dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penyedia jasa konsultansi terdiri dari perusahaan jasa konsultansi, lembaga ilmiah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau lembaga nirlaba (non profit) lainnya, perusahaan jasa industri dan perbankan yang memiliki unit penelitian dan pengembangan dengan keahlian khusus, konsultan perorangan serta lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Penggunaan LSM lebih tepat untuk pelaksanaan jasa konsultansi dalam rangka pengembangan masyarakat (*community development*), peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dan penyuluhan untuk masyarakat, serta penerapan dan penyebarluasan teknologi sederhana dan madya yang tepat guna.
- c. Penggunaan lembaga ilmiah diutamakan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan penelitian dan pengembangan sesuai dengan bidangnya.
- d. Penggunaan unit penelitian dan pengembangan dalam perusahaan jasa industri dan perbankan lebih tepat digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan khusus sesuai dengan bidang spesialisasinya.
- e. Penggunaan konsultan perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan tidak memerlukan kerja kelompok (*team work*) untuk penyelesaiannya;
 2. Pekerjaan hanya dapat dilakukan oleh seorang yang sangat ahli di bidangnya. Keahlian tersebut dibuktikan dengan sertifikat dari asosiasi profesi terkait yang telah dilakukan akreditasi (sepanjang asosiasi tersebut telah ada);

3. Jasa konsultasi tersebut harus bersifat tugas-tugas khusus instansi pelaksana untuk memberikan masukan / nasehat dalam pelaksanaan proyek /kegiatan;
4. Konsultan perorangan yang ditunjuk harus mampu menyelesaikan penugasan secara mandiri ditinjau dari segi teknis, waktu, dan biaya.

2.3.3. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Sebelum melaksanakan pengadaan , pengguna barang/jasa wajib menyusun dan mempersiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan tujuan dan lingkup jasa konsultasi serta keahlian yang diperlukan;
2. Sebagai acuan dan informasi bagi para konsultan yang diundang mengikuti pengadaan dalam rangka menyiapkan kelengkapan administrasi, usulan teknis dan usulan biaya;
3. Sebagai acuan dalam evaluasi usulan, klarifikasi dan negosiasi dengan calon konsultan terpilih, dasar pembuatan kontrak dan acuan evaluasi hasil kerja konsultan.

Kerangka Acuan Kerja sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, asal sumber pendanaan, nama dan organisasi pengguna barang/jasa;
2. Data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, antara lain data dasar, standar teknis, studi-studi terdahulu yang pernah dilaksanakan, dan peraturan perundang-undangan yang harus digunakan;
3. Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan yang memberikan gambaran mengenai tujuan yang ingin dicapai, keluaran yang akan dihasilkan, keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain, peralatan dan material yang disediakan oleh pengguna

- barang/jasa serta peralatan dan material yang harus disediakan oleh konsultan, lingkup kewenangan yang dilimpahkan kepada konsultan, perkiraan jangka waktu pekerjaan jasa konsultansi, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang harus disediakan oleh konsultan, perkiraan keseluruhan tenaga ahli/tenaga pendukung yang diperlukan (jumlah *person-months*) dan jadwal setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan. Khusus untuk pengadaan jasa konsultansi dengan evaluasi pagu anggaran, jumlah tenaga ahli tidak dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
4. Jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan (antara lain laporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan antara dan laporan akhir);
 5. Ketentuan bahwa kegiatan jasa konsultansi harus dilaksanakan di Indonesia, kecuali untuk kegiatan tertentu yang belum mampu dilaksanakan di Indonesia;
 6. Hal-hal lain seperti fasilitas yang disediakan oleh pengguna barang/jasa untuk membantu kelancaran tugas konsultan, persyaratan kerjasama dengan konsultan lain (apabila diperlukan), dan pedoman tentang pengumpulan data lapangan.

2.4. Risiko

2.4.1. Pengertian Risiko

Pengertian risiko dari beberapa sumber yang diambil dari buku Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi karya Soeismo Djojosoedarso adalah sebagai berikut :

- a. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu (Arthur Williams dan Richard, M.H.).
- b. Risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loss*) (A. Abas Salim).
- c. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa (Soekarto)

- d. Risiko merupakan penyebaran / penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan (Herman Darmawi)
- e. Risiko adalah probabilitas sesuatu hasil/*outcome* yang berbeda dengan yang diharapkan (Herman Darmawi).

Dapat disimpulkan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diduga / tidak diinginkan .

Karakteristik risiko adalah :

1. merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa,
2. merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian.

Ujud dari risiko adalah :

1. Berupa kerugian atas harta milik/kekayaan atau penghasilan, misalnya yang diakibatkan oleh kebakaran, pencurian, pengangguran, dan sebagainya.
2. Berupa penderitaan seseorang, misalnya sakit/cacat karena kecelakaan
3. Berupa tanggung jawab hukum, misalnya risiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang lain
4. Berupa kerugian karena perubahan pasar, misalnya karena terjadinya perubahan harga, perubahan selera konsumen dan sebagainya.

2.4.2. Risiko Proyek

Risiko proyek menurut Wideman (1992) adalah efek kumulatif terjadinya ketidakpastian yang berdampak negatif terhadap tujuan suatu proyek.

Secara umum risiko dalam proyek konstruksi berhubungan dengan :

- a. Kegagalan dalam mempertahankan *cost budget/forecast/estimate/tender*.
- b. Kegagalan memenuhi waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak

- c. Kegagalan memnuhi standar teknis dalam hal kualitas, fungsi dan tujuan, keselamatan, lingkungan.

Beberapa dari situasi proyek berisiko yang paling umum ditemui menurut Wideman (1992) adalah :

- a. Pemberi dana proyek dan manajer proyek tidak mengenali bahwa setiap proyek mempunyai kesempatan terjadinya risiko
- b. Proyek sekarang berbeda dengan proyek yang lalu
- c. Perasaan adanya kesulitan
- d. Ketika proyek pada tahap awal, risiko proyek dan kesempatan terjadinya sangat tinggi (tetapi yang mendukung proyek itu lemah).
- e. Cakupan proyek, sasaran dan penyerahannya tidak jelas
- f. Sebagian besar alternatif dirasakan mungkin
- g. Beberapa/seluruh data teknis kurang
- h. Proses teknis dan disain tidak lengkap
- i. Standar untuk kinerja tidak realistik
- j. Biaya, jadwal dan kinerja tidak sesuai ukurannya
- k. Waktu akan datang dari aktivitas dan kejadian tidak jelas
- l. Adanya masukan terhadap kurangnya disain
- m. Bentuk dasar dari bagian inti hilang
- n. Proyek sejenis yang lain terlambat atau batal
- o. Banyaknya variasi dari tawaran yang diterima
- p. Beberapa subsistem kunci atau material kurang sumbernya
- q. Ketidaktepatan dalam perencanaan
- r. Tim proyek bersandar pada keseluruhan perijinan yang tidak pasti

Pengelompokkan risiko proyek berdasarkan sumbernya (Wideman,1992) dibedakan atas 5 kelompok, yaitu :

a. Eksternal di luar prediksi (dan tidak dapat dikontrol) :

1. Kebijakan , yaitu tidak diantisipasi campur tangan pemerintah dalam :
 - a. suplai material
 - b. masalah lingkungan
 - c. standar disain
 - d. standar produksi
 - e. lokasi
 - f. produk/penjualan jasa/ekspor
 - g. harga
 - h. permintaan khusus
2. Bencana alam, seperti ;
 - a. badai
 - b. banjir
 - c. gempa bumi
3. Kejadian tertentu, seperti kerusuhan dan sabotase
4. Dampak sampingan terhadap lingkungan dan sosial
5. Penyelesaian, kegagalan untuk menyelesaikan proyek yang diakibatkan oleh:
 - a. kegagalan dukungan infrastruktur
 - b. kegagalan disain, perjanjian untuk menyuplai dan melaksanakan gagal
 - c. kegagalan menyediakan dana pada akhir proyek
 - d. ketidaktepatan konsep atau bentuk proyek
 - e. kerusuhan politik
 - f. kurangnya penerimaan akhir.

b. Eksternal terprediksi (tetapi tidak dapat dikontrol) :

1. Risiko pasar
 - a. ketersediaan material/bahan mentah
 - b. biaya material/bahan mentah
 - c. permintaan, termasuk penolakan pengguna/pelanggan
 - d. ekonomi
 - e. persaingan
 - f. nilai dalam pasar
 - g. kebijaksanaan pembeli untuk menghormati perjanjian pembelian
2. Operasional
 - a. kebutuhan pemeliharaan
 - b. tujuan yang baik
 - c. keselamatan
3. Pengaruh lingkungan
4. Pengaruh sosial
5. Perubahan mata uang
6. Inflasi
7. Pajak

c. Internal, non teknis (tetapi pada umumnya dapat dikontrol) :

1. Manajemen ;

Kesulitan terjadi akibat integritas rendah, ketidakmampuan, keterbatasan, kehilangan kontrol, ketidakcocokan dalam tujuan, perubahan staff senior, ketidaktepatan atau kekurangan dalam struktur organisasi, kurangnya ketepatan kebijaksanaan dan atau prosedur, ketidakmampuan dalam perencanaan, jadwal yang tidak realistis, kurangnya koordinasi, ketidakmampuan manajemen proyek.

2. Jadwal ;

Keterlambatan terjadi akibat kesulitan yang dialami manajemen karena hal-hal yang telah disebutkan di atas, aturan perizinan, kekurangan pekerja, produktivitas pekerja, penghentian pekerja, keterlambatan pengiriman, kondisi lapangan yang tidak terduga, perubahan pendukung/pengguna lapangan, kecelakaan/sabotase, terjadinya kesulitan pada awal, pelaksanaan dan pelimpahan proyek serta keterbatasan pengaksesan.

3. Biaya;

Terjadi kelebihan biaya diakibatkan jadwal mengalami keterlambatan seperti di atas, ketidaktepatan strategi penyediaan barang , negosiasi pembayaran, manajemen dan atau pekerja yang tidak berpengalaman, keterbatasan saling pengertian antar bagian, klaim dari kontraktor, di bawah taksiran, dan faktor-faktor luar lainnya

4. *Cash-flow* ;

Terjadinya tekanan, halangan, dan kebangkrutan

5. *Loss of potential* ;

Hilangnya kepentingan dan keuntungan

d. Teknis (dan secara umum dapat dikontrol) :

1. Perkembangan teknologi
2. *Performance*
3. Dampak teknologi
4. Disain
5. Kompleksitas proyek

e. **Hukum :**

Kesulitan yang muncul berasal dari ;

1. Surat ijin
2. Hak paten
3. Kontrak ; terjadi kesalahan interpretasi, salah pengertian, ketidaktepatan strategi /tipe kontrak, dan terjadi kegagalan.
4. Gugatan dari pihak luar
5. Gugatan dari pihak dalam
6. *Force Majeure*

2.5. Ketidakpastian

Ketidakpastian adalah merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko .

Klasifikasi ketidakpastian meliputi :

- a. Ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*), yaitu kejadian-kejadian yang timbul sebagai akibat kondisi dan perilaku dari pelaku ekonomi, misalnya : perubahan sikap konsumen, perubahan selera konsumen, perubahan harga, perubahan teknologi, penemuan baru dan sebagainya.
- b. Ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*), yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam, misalnya : badai, banjir, gempa bumi, kebakaran dan sebagainya.
- c. Ketidakpastian kemanusiaan (*human uncertainty*), yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia, seperti peperangan, pencurian, penggelapan, pembunuhan dan sebagainya.

2.6. Metode Pengidentifikasian Risiko

Metode yang digunakan antara lain :

- a. Daftar pertanyaan (*questionair*) untuk menganalisis risiko, yang dari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan petunjuk – petunjuk tentang dinamika informasi khusus, yang dapat dirancang secara sistematis tentang risiko yang menyangkut kekayaan maupun operasi perusahaan.
- b. Menggunakan laporan keuangan, yaitu dengan menganalisis neraca , laporan pengoperasian dan catatan pendukung lainnya, akan dapat diketahui/diidentifikasi semua harta kekayaan, hutang-piutang dan sebagainya, sehingga dengan merangkai laporan-laporan tersebut dan berdasarkan ramalan-ramalan anggaran keuangan akan dapat menentukan penanggulangan risiko di masa mendatang.
- c. Membuat *flow-chart*
- d. Inspeksi langsung
- e. Interaksi dengan departemen /bagian-bagian dalam perusahaan
- f. Interaksi dengan pihak luar
- g. Analisis terhadap kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain
- h. Membuat dan menganalisis catatan / statistik mengenai berbagai kerugian yang telah pernah diderita.
- i. Analisis lingkungan.

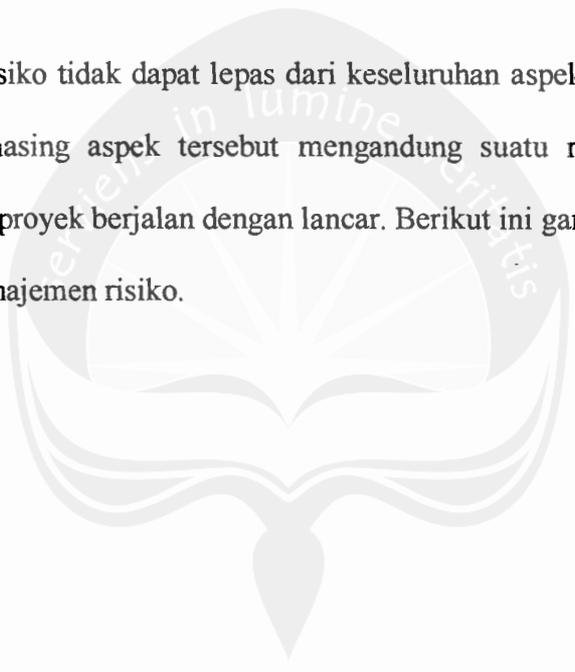
2.7. Manajemen Risiko

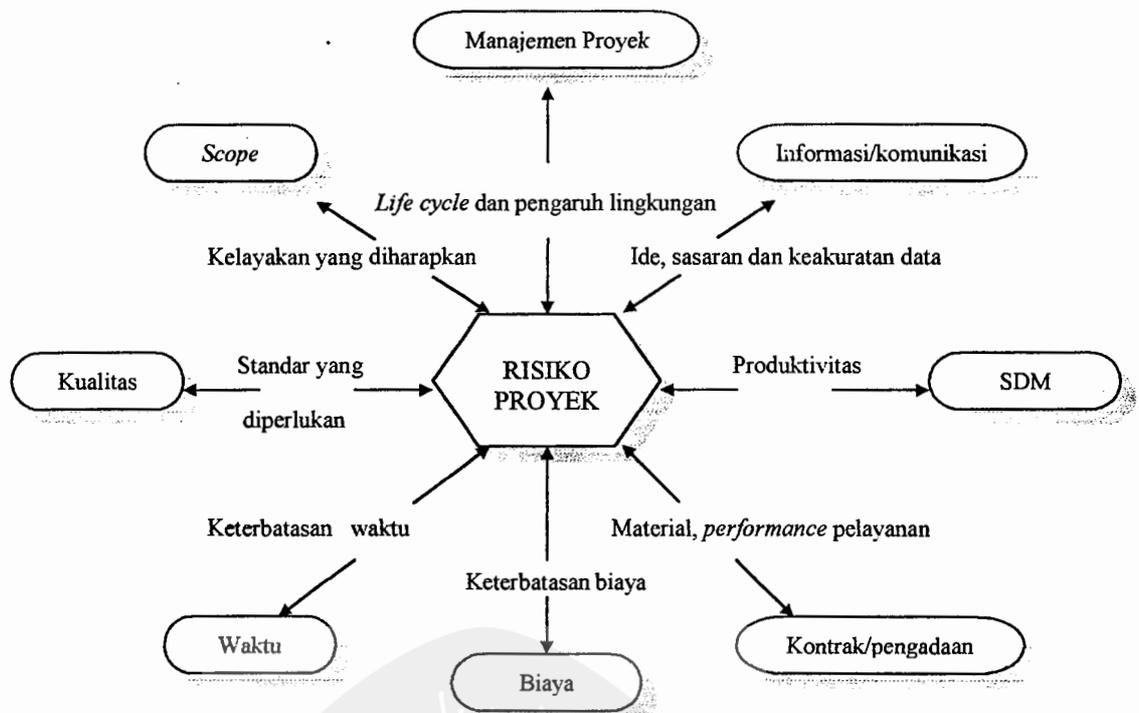
2.7.1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen resiko terdiri dari dua kata, yakni manajemen yang oleh Elmore Petersons dan E. Gresvenor Plowman (1973) diartikan sebagai suatu teknik atau cara sedangkan untuk kata risiko oleh Edward R. Fisk (1978) didefinisikan sebagai variasi

dari suatu situasi akibat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di alam. Teknik dimaksudkan sebagai maksud dan tujuan dari sekelompok manusia tertentu yang dapat ditetapkan, diklasifikasikan dan dilaksanakan (Djojowirono,1984). Jadi pada intinya manajemen risiko dapat diartikan sebagai suatu usaha dari sekelompok manusia dengan menggunakan teknik atau cara tertentu untuk mengelola kemungkinan dari situasi yang tidak diharapkan. Sedangkan pengertian manajemen risiko menurut Soeisno Djojosoedarso (1999) adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga dan masyarakat.

Manajemen risiko tidak dapat lepas dari keseluruhan aspek dari manajemen proyek karena masing-masing aspek tersebut mengandung suatu risiko yang memerlukan penanganan agar proyek berjalan dengan lancar. Berikut ini gambar diagram risiko yang terdapat pada manajemen risiko.





Gambar 2.4. Risiko yang Terdapat pada Manajemen Proyek

Sumber : Wideman (1992), *Project and Program Risk Management A Guide to Managing Project Risk and Opportunities*, Project Management and Institute, hal. II-2.

2.7.2. Tugas Manajemen Risiko

Tugas-tugas manajemen risiko mencakup pengidentifikasian risiko-risiko yang dihadapi, mengukur atau menentukan besarnya risiko, mencari jalan untuk menghadapi atau menaggulangi risiko, selanjutnya menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikan risiko, mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan risiko serta mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat.

2.7.3. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko adalah sebagai berikut :

- a. membantu pengambilan keputusan agar lebih sistematis dan obyektif.

- b. memperjelas perbandingan ketidakpastian dari proyek yang kusut masalahnya ke arah yang lebih mendetail.
- c. menunjukkan hubungan antar setiap risiko dengan cepat.
- d. meningkatkan pemahaman dan pemikiran terhadap suatu proyek melalui identifikasi risiko dan alur tanggapannya.
- e. memperlihatkan tanggungjawab perusahaan kepada kliennya

2.7.4. Sistem Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko meliputi :

- a. mengidentifikasi risiko
- b. mengklasifikasi risiko
- c. menganalisis risiko
- d. mengambil sikap terhadap risiko
- e. menanggapi risiko

Berikut penjelasan umum kerangka kerja manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel.

Tabel 2.1 Kerangka Kerja Manajemen Risiko

No.	Tahapan Kerja dalam Manajemen Risiko	Penjelasan Umum
1.	Mengidentifikasi risiko	Mengidentifikasi sumber dan bentuk-bentuk risiko
2.	Mengklasifikasi risiko	Mempertimbangkan bentuk dari risiko dan pengaruhnya pada orang/manusia
3.	Menganalisis risiko	Mengevaluasi konsekuensi yang berhubungan dengan bentuk atau kombinasi risiko dan memperhatikan dampaknya dengan menggunakan beberapa teknik analisa
4.	Sikap terhadap risiko	Setiap keputusan terhadap penanganan risiko tergantung pada sikap orang atau orang yang memberikan keputusan
5.	Menangani risiko	Mempertimbangkan cara untuk mengatur risiko baik dengan mentransfernya ke bagian lain atau dengan menanganinya secara langsung.